

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN
PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS KATEGORI LIMBAH B3 (BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN) DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Dwi Rizky Rahmadhani Khoirunnisa¹⁾, Eny Haryati²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: dwirizkyrahmadhanikn@gmail.com

ABSTRAK

Di Kabupaten Mojokerto tepatnya di Desa Lakardowo terdapat sebuah pabrik pengelola limbah medis. Dimana pabrik itu bernama PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi). Sejak beroperasinya PT. PRIA masyarakat sudah merasakan dampak negatifnya. Diantaranya yaitu timbul penyakit gatal-gatal (sakit kulit), gangguan pernafasan, menurunnya kualitas air bersih, menurunnya kualitas udara, menurunnya kualitas tanah persawahan milik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa : 1) Kurangnya sosialisasi terkait bahaya limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) baik kepada masyarakat ataupun pihak pelaku usaha dalam hal ini PT. PRIA 2) dalam pelaksanaan pengawasannya yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengawasan langsung 3) Kurangnya intensitas jadwal pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi). Kemudian untuk saran: 1) Meningkatkan sosialisasi secara langsung ataupun dengan melakukan webinar terkait bahaya limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) kepada masyarakat serta para pelaku usaha industry, 2) Melakukan rekrutmen/penambahan kuota jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD), 3) Mengikutsertakan pelaku eksternal baik dari LSM ataupun tokoh masyarakat sekitar dalam proses pengawasan.

Kata Kunci: Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)

ABSTRACT

In Mojokerto Regency, precisely in Lakardowo Village, there is a medical waste management factory. Where the factory was named PT. MEN (Son of Eternal Mother's Blessing). Since the operation of PT. Men in the community have already felt the negative impact. Among them are itching (skin disease), respiratory problems, decreased quality of clean water, decreased air quality, and decreased quality of community-owned rice fields. This study aims to determine the effectiveness of the supervision carried out by the Mojokerto Regency Environmental Service. This research is a qualitative research using a descriptive approach with data collection techniques of literature study, observation, interviews, and documentation. The results of this study found that: 1) Lack of socialization related to the dangers of medical waste in the category of B3 waste (hazardous and toxic materials) both to the public and business actors, in this case PT. PRIA 2) in carrying out its supervision, namely the limited human resources (HR) owned by the Mojokerto Regency Environmental Service and not involving the community in direct supervision 3) Lack of intensity of the schedule for monitoring implementation in the management of hazardous and toxic waste (B3) at PT. MEN (Son of Eternal Mother's Blessing). Then for suggestions: 1) Increase socialization directly or by conducting webinars related to the dangers of medical waste in the category of B3 waste (hazardous and toxic materials) to the public and industrial business actors, 2) Recruiting/adding quotas for the number of Environmental Supervisory Officers (PPLHD), 3) Involving external actors from or local community leaders in the monitoring process.

Keywords: B3 waste (hazardous and toxic materials)

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dari bidang ekonomi, kesehatan ataupun pendidikan. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Hampir seluruh Negara di dunia menginginkan pembangunan. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Bab 10 Pasal 68 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Di Kabupaten Mojokerto tepatnya di Desa Lakardowo terdapat sebuah pabrik pengelola limbah medis. Dimana pabrik itu bernama PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi). Pabrik tersebut berdiri sejak tahun 2010, fasilitas layanan yang diberikan oleh PT. PRIA antara lain: pengangkutan limbah B3, penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pengolahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3 (fasa padat), pemanfaatan limbah B3 (fasa minyak), penyedotan dan pembersihan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) serta pemusnahan produk bekas/kadaluarsa (*reject/off space*). Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan tetap terjaganya keseimbangan alam dari segi kuantitas maupun kualitas perlu adanya pihak yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan yang menghasilkan limbah

yang berbahaya bagi lingkungan dan sekitarnya. Berdasarkan uraian diatas dan memahami pentingnya pengawasan

yang di terapkan oleh aparaturnya pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Mojokerto dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mojokerto dan pihak-pihak yang terlibat, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS KATEGORI LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DI PROVINSI JAWA TIMUR”.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Efektifitas

Menurut Supriyono Efektivitas adalah hubungan antara output suatu pusat pertanggungjawaban dengan target yang harus dicapai, semakin besar kontribusi dari output yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian target tersebut maka unit tersebut dapat dikatakan efektif juga. Handayani mengatakannya bahwa “Efektivitas adalah ukuran dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya”. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Etzioni, “efektivitas dapat dikatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran”.

2. Pendekatan Efektifitas

Menurut Robbins, efektivitas kerja dapat dicapai melalui empat pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan pencapaian tujuan, menunjukkan bahwa efektivitas dinilai lebih dalam kaitannya dengan tujuan akhir

daripada proses. Jika tujuan tercapai maka pekerjaan dikatakan efektif.

- 2) Pendekatan sistem, tidak menekankan pada tujuan akhir tetapi memasukkan semua kriteria dalam satu elemen dan masing-masing akan saling berinteraksi.
- 3) Pendekatan konstituen strategis, menunjukkan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang dapat memuaskan keinginan para konstituennya dalam lingkungannya
- 4) Pendekatan nilai bersaing, mengakui bahwa tidak ada kriteria terbaik. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana tujuan tersebut dicapai sangat tergantung pada situasi yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan efektivitas adalah pencapaian tujuan bukan pelaksanaan tugas yang ingin dicapai secara berkualitas, tepat waktu, tepat sasaran dan efektif. Sehingga keempat pendekatan tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa efektif pengawasan yang akan dilakukan.

3. Pengukuran Efektifitas

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.

- 2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi.
- 3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

4. Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam bukunya yang berjudul *Efektivitas Organisasi*, yaitu:

- 1) Karakteristik Organisasi, terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara.
- 2) Karakteristik Lingkungan, aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja.
- 3) Karakteristik Pekerja, pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas.
- 4) Kebijakan dan Praktek Manajemen, dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumit.

5. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberi tugas agar dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia dengan baik

dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang justru dapat menimbulkan kerugian. Oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

6. Maksud dan Tujuan

Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah:

- 1) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- 2) Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

7. Prinsip Pengawasan Handyaningrat

mengemukakan bahwa:

- 1) Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi
- 2) Pengawasan harus obyektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- 3) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- 5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang obyektif, teliti dan tepat.
- 6) Pengawasan harus bersifat terus menerus
- 7) Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan

balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

8. Proses Pengawasan

Tahap-tahap dalam Proses Pengawasan menurut Manullang (2012:91) terdiri dari paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahapannya yaitu:

- 1) Tahap Penetapan Standar, adalah penetapan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai "patokan" untuk penilaian hasil.
- 2) Tahapan Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, adalah sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata.
- 3) Tahap Penentuan Pelaksanaan Kegiatan, ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu: pengamatan (observasi), laporan-laporan, metoda-metoda otomatis dan inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.
- 4) Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan, adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.

9. Metode Pengawasan

Untuk mencapai pengawasan yang sesuai, maka pelaksanaan pengawasan harus berdasarkan kepada teknik atau jenis

pengawasan, yang perlu dilakukan oleh seorang pimpinan dalam mengawasi bawahannya. Pengawasan sendiri dapat ditinjau dari berbagai metode-metode (Sondang P. Siagian, 2004:157)

- 1) Pengawasan ditinjau dari metode pelaksanaannya
 - a) Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan.
 - b) Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.
- 2) Pengawasan ditinjau dari sifatnya
 - a) Pengawasan preventif, dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai.
 - b) Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, setelah pekerjaan selesai atau biasa dikenal dengan evaluasi.
- 3) Pengawasan ditinjau dari ruang lingkupnya
 - a) Pengawasan internal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi sendiri.
 - b) Pengawasan eksternal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri.
- 4) Pengawasan ditinjau dari

subyek yang melaksanakannya

- a) Pengawasan melekat, adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya,
- b) Pengawasan fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah.
- c) Pengawasan masyarakat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparat pemerintah yang berkepentingan.
- d) Pengawasan legislative, adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Martin dan Lubis (1987:55) terkait 3 (tiga) indikator pengukuran efektivitas yaitu: pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai keefektifan pelaksanaan pengelolaan limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap beroperasinya PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi).

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Itu artinya permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti tidak berkenaan dengan angka-angka namun berupa pernyataan yang berisi mengenai efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

2. Focus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap beroperasinya pabrik pengolah limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Penelitian ini nantinya menggunakan teori yang dikemukakan oleh dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55) bahwa terdapat tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas yaitu: pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai keefektivan pelaksanaan pengelolaan limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

terhadap beroperasinya PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi).

3. Informan Penelitian

Pada penelitian ini penulis berusaha mendapatkan data dengan menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Sementara itu informan pada penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Penegak Hukum Lingkungan	1
2	Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah	1
3	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1
4	Masyarakat Desa Lakardowo	2
5	Masyarakat Mojosari	1
6	Masyarakat sekitar TPA Karangdiyeng	2
JUMLAH		8

Sumber: Data Peneliti

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi mengenai efektifitas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di PT. PRIA. Oleh karena itu, penulis menetapkan di beberapa lokasi penelitian diantaranya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto di JL. Pemuda No. 55B Bulanan Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan di desa Lakardowo sekitar PT. PRIA.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka

Kabupaten Mojokerto merupakan satu-satunya kota di provinsi Jawa Timur, bahkan di Indonesia yang memiliki satuan wilayah maupun luas wilayah terkecil. Luas keseluruhan wilayah kabupaten Mojokerto adalah 969,36 Km². Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan, 5 Kelurahan, Desa 299.1 Secara geografis kota Mojokerto berada di antara 70 27' 0.16"-7 0 29' 37.11" LS dan 120 27'24" BT. Sedangkan ditengah-tengah terdapat wilayah Kota Mojokerto.

- 2) Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto



Gambar 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Sumber: dokumentasi penelitian tanggal 02 Januari 2022

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur atau komponen pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto beralamatkan di Jl. Pemuda No 55B Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

- 3) Gambaran Umum Desa Lakardowo Kecamatan Jetis

Gambar 4. Peta Wilayah Desa Lakardowo



Sumber: mojokertokab.go.id

Desa Lakardowo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Secara geografis Desa Lakardowo terletak disebelah utara Sungai Brantas. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah barat dibatasi oleh Kecamatan Gedeg dan Kecamatan Kemlagi
- 2) Sebelah utara dibatasi oleh Kecamatan Dawarblandong
- 3) Sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Gresik dan Kalimas
- 4) Sebelah selatan dibatasi oleh sungai Brantas

2. Hasil Temuan Penelitian

1) Efektifitas Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Beroperasinya PT. Putra Restu Ibu Abadi

a. Pendekatan Sasaran

Disini Peneliti melihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto melakukan pengembangan dan produktivitas dengan melalui TRC (Tim Reaksi Cepat) serta bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola dan menjadikan TPA (tempat pembuangan akhir) sebagai tempat

edukasi terkait pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu TPA yang dikelola menjadi tempat wisata edukasi yaitu di TPA Karangdiyeng.



Gambar 5. Bupati bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto pada saat launching tim reaksi cepat dan TPA Karangdiyeng pada tahun 2020

Sumber: dlhmojokertokab.go.id



Gambar 6. TPA Karangdiyeng

Sumber: dlhmojokertokab.go.id

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto memang sudah melakukan pengembangan yaitu dengan bersinergi bersama pihak-pihak terkait dalam mengelola TPA Karangdiyeng sebagai tempat wisata edukasi.

b. Pendekatan Sumber

Pada pendekatan sumber disini yang dilihat oleh Peneliti yaitu terkait sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarana. Dinas Lingkungan Hidup selaku yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto anggaran yang dimiliki untuk melaksanakan pengawasan sudah cukup memadai yang didapatkan setiap tahunnya.

c. Pendekatan Proses

Pada pendekatan proses disini Peneliti focus pada SOP serta jadwal kopengawasan. Tujuan dari adanya Standar operasional prosedur (SOP) adalah memperjelas dan mempermudah proses pemberian tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap pegawainya, memudahkan dan mengetahui terjadinya suatu kesalahan atau kegagalan didalam proses kerja serta memudahkan proses pengontrolan kerja masing-masing pegawainya.

Sedangkan jadwal pelaksanaan pengawasan langsung yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di PT. PRIA yaitu hanya 1 kali dalam satu tahun. Sedangkan jadwal pengawasan secara tidak langsung yakni, berupa laporan hasil pengelolaan limbah berbahaya dan Beracun di Kabupaten Mojokerto.

2) Faktor Penghambat Proses Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap PT. Putra Restu Ibu Abadi

Faktor penghambat yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pengawasan terhadap PT. Putra Restu Ibu Abadi yaitu minimnya sumber daya manusia yang ada pasalnya pengawasan langsung hanya dilakukan oleh 5 (lima) pejabat pengawas serta akses menuju tempat atau lokasi industri.

3. Pembahasan

1) Efektivitas Pengawasan Pengolahan Limbah Medis Kategori Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap PT. Putra Restu Ibu Abadi

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan oleh Peneliti maka efektivitas pengawasan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap PT. Putra Restu Ibu Abadi adalah:

a. Pendekatan Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sudah melakukan pengembangan dan produktivitas dengan melalui dikelola TPA (tempat pembuangan akhir) sebagai tempat wisata edukasi, TPA (tempat pembuangan akhir) tersebut terletak di Karangdiyeng.

Sebelumnya TPA Karangdiyeng hanya digunakan untuk penampungan limbah namun pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto bersama Bupati Mojokerto melaunching TPA Karangdiyeng sebagai tempat wisata edukasi. Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan pendekatan sasaran.

b. Pendekatan Sumber

Berdasarkan dari hasil temuan bahwa sumber daya manusia yang terlibat pada saat melakukan pengawasan di PT. hanya dari pelaku internal saja. Pelaku internal yang dimaksud adalah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) sebanyak 5 anggota. Sedangkan untuk pelaku eksternal yang dimaksud bisa berasal dari lembaga swadaya masyarakat ataupun aktivis masyarakat.

Sedangkan untuk aspek sumber anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto berasal dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan pengawasan ke berbagai tempat usaha atau industri.

c. Pendekatan Proses

Pada pendekatan proses Peneliti focus pada tahapan

serta jadwal pengawasan. Tahapan sebuah panduan atau langkah yang digunakan guna kegiatan suatu organisasi berjalan dengan lancar. Ada beberapa tahapan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, tahapan tersebut yakni:

- 1) Tahap Persiapan
 - a) Menyiapkan keterangan administrasi.
 - b) Mempelajari peraturan/dokumen yang terkait dokumen yang harus disiapkan.
- 2) Tahap Pelaksanaan
 - a) Di lokasi kegiatan, setibanya di lokasi petugas menunjukkan surat penugasan dengan menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan
 - b) Pertemuan pendahuluan, yang berisi perkenalan antara pejabat pengawas dengan penanggung jawab usaha.
 - c) Pemeriksaan Lokasi Usaha dan atau kegiatan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas di lokasi kegiatan dan atau usaha meliputi
 - d) Perencanaan Peta: Memeriksa data perencanaan usaha dan atau kegiatan mengenai peta lingkungan yang diperlukan serta cara-cara pencapaian sasarannya;

Mengkaitkan perencanaan tersebut dengan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup yang ada.

- e) Pelaporan Usaha dan atau kegiatan. Memeriksa laporan mengenai: Operasi kegiatan misalnya Log Book debit limbah, kapasitas produksi dan lain-lain; Catatan menyangkut keadaan darurat dan kendala yang dihadapi.
- f) Kondisi Umum Fisik Usaha dan atau Kegiatan: Memeriksa kondisi housekeeping di seluruh lokasi; Mencatat jika terdapat kebisingan atau bau yang melebihi kondisi normal; Meneliti jika terjadi perubahan warna pada permukaan tanah; Mencatat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atau dalam perbaikan,
- g) Aspek Perubahan Proses Produksi: Memeriksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan; Memeriksa jika terjadi modifikasi pada proses produksi; Memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut di atas; Melakukan verifikasi pada setiap perubahan

yang ada dan mencatat temuan ke dalam Laporan Pengawasan.

3) Wawancara

Salah satu cara pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan adalah wawancara.

Beberapa hal yang harus diperhatikan Pejabat Pengawas dalam melakukan wawancara adalah:

a. Cara Bertanya: Menggunakan bahasa yang sopan lugas dan jelas; Bertanya dari aspek umum ke aspek spesifik; Memberi waktu kepada petugas untuk memikirkan jawaban; Menghindari pertanyaan yang mengarah kepada jawaban yang tidak diinginkan; Menghindari subyek pertanyaan yang sama pada beberapa pertanyaan; Tidak mencampuradukkan pertanyaan yang menyangkut kondisi dahulu saat ini; Menggunakan ukuran standar.

b. Cara Mendokumentasikan Jawaban Pertanyaan: Menggunakan buku catatan, alat perekam atau video; Mencatat jawaban seakurat mungkin; Menghindari penggunaan waktu seluruhnya hanya untuk

mencatat jawaban dari petugas yang diwawancarai:

4) Pengambilan Sampel:

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel antara lain: Mencatat kode sampel titik pengambilan sampel; Apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menolak dibuat Berita Acara penolakan; Apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menolak menandatangani Berita Acara Penolakan maka Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat meminta bantuan yang berwajib agar penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk menandatangani Berita Acara Penolakan tersebut; Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan Sampel (teknis, mekanisme, peralatan, dan lain-lain).

5) Pengambilan Gambar/Foto/Video

Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

a) Foto: Foto-foto yang tajam dan tepat akan bernilai sebagai bukti mengenai kondisi penataan lingkungan dari usaha dan atau kegiatan

pada saat pengawasan dilakukan.

b) Video: Dalam pengambilan video dapat memberitahukan terlebih dahulu kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan; Apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menolak, dibuat Surat Pernyataan Penolakan;

c) Gambar dan Peta: Membuat sketsa lokasi pengawasan usaha dan atau kegiatan; Menelaah gambar teknik, diagram alir proses, grafik, bagan-bagan, diagram maupun peta-peta;

6) Dokumentasi

Pejabat Pengawas wajib mendokumentasikan seluruh data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup secara rinci, sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya), dan jelas (dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waktu, tempat/sumber informasi diperoleh. Dokumentasi berupa hasil wawancara, foto/gambar, hasil analisa sampel.

2) Faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan Pengolahan Limbah Medis Kategori Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang dilakukan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap beroperasinya PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi) yaitu rendahnya sumber daya manusia pada saat pelaksanaan pengawasan. Hal itu karena pelaku pengawasan hanya sebanyak 5 orang yang merupakan anggota dari PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah). Pasalnya dari pihak pelaku eksternal dalam hal ini masyarakat juga tidak diikutserakan dalam proses pengawasan.

Selain minimnya sumber daya manusia factor akses menuju ke PT. PRIA juga terbilang susah pasalnya jarak antara PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi) dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah sekitar 20 km dengan jarak tempuh sekitar 35 menitan. Akses jalan ke lokasi (PT. PRIA) juga terbilang susah karena jalan aspalnya yang masih bergelombang. Disamping itu jaringan internet di lokasi usaha ata PT. PRIA juga terbilang susah karena wilayah tersebut jauh dai perkotaan. Oleh karena itu proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sedikit terhambat.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti mengenai efektivitas pengawasan pengolahan limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di provinsi Jawa Timur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan

pengawasan kepada PT. PRIA belum berjalan dengan efektif pasalnya:

- 1) Kurangnya sosialisasi terkait bahaya limbah medis kategori limbah B3.
- 2) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan masih belum berjalan optimal dan efektif, dalam pelaksanaan pengawasannya.
- 3) Kurangnya intensitas jadwal pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 4) Susahnya akses jalan menuju Lokasi (PT. Pria).

2. Saran

Berdasarkan pelaksanaan efektivitas pengolahan limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di Provinsi Jawa Timur, maka dapat diambil beberapa saran dan masukan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sosialisasi secara langsung ataupun dengan melakukan webinar.
- 2) Melakukan rekrutmen / penambahan kuota jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD)
- 3) Meningkatkan intensitas jadwal pengawasan langsung.
- 4) Memperbaiki jalan dan jaringan internet di setiap daerah guna mempermudah dalam proses pengawasan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan”, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No. 01 (Diakses pada tanggal 01 Desember 2021)
- Asnawi. 2013, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM,
- Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2007
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Jogjakarta, 2000,
- Handyaningrat, *Azas-azas Organisasi Manajemen*, Cv Mas Agung, Jakarta, 1995,
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Jogjakarta, 2007
- Martini dan Lubis, 1987. *Teori Organisasi*, Bandung: Ghalia Indonesia
- Siagian, Sondang, P. 1987. *Manajemen modern*, Jakarta: PT. Gunung Agung
- Robbins, Stephen P. 1996, *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Alih Bahasa, Handayana Pujaatmaka. Edisi Keenam